

16A_Konstruktivism.pdf

by

Submission date: 12-Aug-2020 03:05PM (UTC+0800)

Submission ID: 1368720917

File name: 16A_Konstruktivism.pdf (670.32K)

Word count: 6286

Character count: 44426

9

Konstruktivisme

I Gede Wahyu Wicaksana

PENGANTAR

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI) yang mulai populer sejak dekade 1990-an setelah Perang Dingin berakhir. Bab ini membahas mengenai asal mula kemunculan perspektif konstruktivisme dalam studi HI kontemporer, karakteristik dasar dan prinsip utama konstruktivisme, cara pandang konstruktivis tentang politik global, dan relevansi konstruktivisme sebagai referensi teoritis maupun metodologis untuk kegiatan analisis serta riset hubungan internasional.

Sebagai penuntun diskusi, perlu disampaikan bahwa yang dimaksud konstruktivisme dalam buku ini adalah perspektif teoritis HI yang berseberangan secara ontologi, epistemologi, dan metodologi dengan rasionalisme ala Amerika (*American rationalism*) termasuk neorealisme dan neoliberalisme (neo-neo) di satu sisi, dan bukan merupakan bagian dari teori kritis¹ (*critical theory*) atau perspektif pospositivisme, seperti feminisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme. Agar lebih jelas, maka pembahasan mengenai konstruktivisme

¹ Teori Kritis (dengan awalan huruf besar digunakan untuk merujuk kepada teori-teori sosial dan HI yang diinspirasi oleh Mazhab Frankfurt. Sedangkan teori kritis (tanpa awalan huruf besar) digunakan untuk merujuk teori-teori sosial dan HI posstrukturalis secara umum yang mencakup; Mazhab Frankfurt, posmodernisme, feminisme, dan poskolonialisme.

disituasikan dalam konteks perdebatan; rasionalisme vs konstruktivisme dan konstruktivisme vs teori kritis sebagaimana dikemukakan oleh Reus-Smit (2005).

KEMUNCULAN KONSTRUKTIVISME DALAM STUDI HI

Kemunculan konstruktivisme dalam studi HI tidak terlepas dari pengaruh diskursus-diskursus konstruktivis yang lebih dahulu berkembang dalam Filsafat Ilmu dan Filsafat Sosial. Gagasan fundamental konstruktivis secara umum berkaitan erat dengan hakikat pengetahuan yang senantiasa terikat pada ide atau konsep ciptaan manusia; oleh sebab itu manusialah yang membuat dunia sosial (terjemahan dari *social world*) di mana mereka tinggal (Phillips, 2007:61–62). Dengan demikian fakta dalam wujud fisik maupun sosial tidak bisa berbicara sendiri kepada para pengamat, namun hanya merespons pertanyaan yang diajukan oleh sang pemilik ide/pengamat. Para penganut cara pandang konstruktivisme tentang hakikat dunia sosial dalam studi HI mengadopsi premis konstruksi sosial (*social construction*) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi—dari level mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan. Sehingga dalam konteks politik global tindakan para aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui pelbagai kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Cara pandang konstruktivis mengenai karakter hubungan antaraktor internasional demikian dikonseptualisasikan oleh Alexander Wendt (1992) menjadi sebuah proposisi *anarchy is what states make of it*, yang kemudian menjadi ciri khas dan label paradigma konstruktivisme HI.

Berbeda dengan teorisasi mapan (*established theories*), seperti perimbangan kekuatan (*balance of power*) dari realisme dan perdamaian demokratis (*democratic peace*) dari liberalisme, konstruktivisme bukan merupakan sebuah teori pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial dan politik, melainkan sebuah kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan faktor yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan dimuat dalam teori-teori HI yang berasal dari paradigma realisme/neorealisme dan liberalisme/neoliberalisme. Misalkan,

Weber (2005) menjelaskan konstruktivis berasumsi tentang perubahan dalam politik global tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Terdapat aktor-aktor lain, di samping negara sebagai aktor penting, seperti individu, kelompok elit, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial yang berperan di tengah arena hubungan antarbangsa. Sehingga konstruktivisme berbeda dengan neo-neo yang memposisikan negara sebagai satu unit aktor utuh (*unitary actor*).

Mengenai faktor yang bekerja di balik politik global, konstruktivis tidak serta merta mengabaikan peran dan pengaruh faktor kekuatan material, seperti kapabilitas militer, namun berpandangan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor negara dan nonnegara bertindak di tengah arena internasional. Anarki bukanlah suatu tatanan diskrit (terputus secara evolusioner) dan eksklusif, namun mempunyai elemen-elemen yang beroperasi secara kontinu sesuai aturan main hukum internasional yang mengatur perilaku dan relasi antaraktor, disebut pula subjek hukum internasional. Selain itu mekanisme kooperatif seperti diplomasi berfungsi signifikan untuk merekonsiliasikan perbedaan ekspektasi aktor-aktor yang menginterpretasi kehadiran satu dengan yang lain secara berbeda. Dengan kata lain konstruktivis berpendapat aspek sosial efektif dalam memengaruhi praktek politik global (Kubalkova ed, 2000).

Aspek sosial yang dimaksud—ide dan norma—oleh konstruktivis beraneka ragam, sehingga menghasilkan perdebatan dan kontradiksi internal di antara para konstruktivis. Apabila literatur tentang kemunculan HI konstruktivis ditelusuri secara seksama, maka akan diperoleh bermacam ketidaksepakatan intelektual yang tajam di antara para konstruktivis. Sebagai contoh dalam konstruktivisme ada aliran konvensional (Hopf, 1998) dan aliran kritis (Price dan Reus-Smit 1998). Ketidaksepahaman antara konstruktivisme konvensional dan kritis terpusat pada pertentangan yang berakar pada gagasan awal yang mengilhami kemunculan proyek riset konstruktivis dalam studi HI. Konstruktivisme konvensional hadir sebagai revisi dan reformasi terhadap perspektif neo-neo yang didominasi oleh argumentasi mengenai kekuatan dan kepentingan material aktor di tengah sistem internasional yang anarkis. Bagi konstruktivis konvensional identitas aktor juga berimplikasi pada sistem internasional, dan terbukti berpengaruh lebih besar

daripada kapabilitas dan kepentingan strategis negara. Sedangkan konstruktivisme kritis hadir sebagai agenda revisi dan reformasi terhadap kelemahan-kelemahan teoritis neo-neo yang tidak memberi ruang fleksibel bagi eksplorasi wacana kritik sosial, termasuk skeptisisme, konflik dan transformasi sosial. Mereka terinspirasi oleh Sosiologi posstrukturalis Foucault, Derrida, Gramsci, dan varian Marxisme Mazhab Frankfurt. Meskipun demikian Adler (2005:11) melihat perbedaan antara konstruktivisme konvensional dan kritis hanya sebatas pilihan subyektif para pengkaji dan peneliti. Pada dasarnya mereka memiliki pandangan sama dalam hal tujuan, yakni *sees the world as a project under construction, as becoming rather than being*. Jadi kedua spektrum konstruktivisme HI menolak eksistensialisme.

Lebih lanjut Adler (2005:12) menambahkan kesamaan antara konstruktivisme konvensional dan kritis tampak secara ontologis, epistemologis, dan metodologis. Dari sisi ontologi—pengertian tentang eksistensi dan ruang lingkup objek studi, konstruktivis sepakat bahwa dunia sosial merupakan struktur dan proses yang bermakna secara intersubjektif dan kolektif. Dari sisi epistemologi—pengertian mengenai esensi pengetahuan, konstruktivis berbagi pandangan bahwa interpretasi adalah bagian intrinsik dari riset berbasis Ilmu Sosial, dan mereka menekankan kepada generalisasi yang bersifat kontingensi; tergantung kepada berbagai variabel. Dan dari sisi metodologi—prinsip-prinsip operasionalisasi penelitian, konstruktivis baik yang berlabel konvensional maupun kritis menolak prinsip individualisme metodologis neo-neo yang secara berlebihan menempatkan unit-unit eksplanasi dan relasi di antara mereka ke dalam beberapa peringkat analisis, misalkan individu, negara, dan sistem. Para konstruktivis keleluasaan di dalam memperlakukan variabel-variabel penjelas fenomena dan tidak mau terikat secara ketat oleh kaidah-kaidah positivisme neo-neo.

ASUMSI DASAR DAN PRINSIP UTAMA KONSTRUKTIVISME

Sebagai sebuah perspektif teoritis alternatif terhadap neo-neo dalam studi HI kontemporer, konstruktivisme menawarkan gagasan-gagasan yang berbeda dengan tiga unsur fundamental kerangka analisis dan teorisasi neo-neo, yang meliputi; individualisme metodologis, materialisme kepentingan

yang berlandaskan pada pilihan-pilihan rasional, dan sistem anarkis yang mendorong perilaku strategis aktor internasional. Untuk memudahkan pemahaman mengenai asumsi dasar dan prinsip utama konstruktivisme, dirumuskanlah pertanyaan sederhana, yakni mengapa aktor (negara berdaulat) melakukan tindakan eksternal tertentu? Jawaban yang diberikan oleh neo-neo sangat mudah ditebak; tindakan eksternal atau kebijakan luar negeri ditujukan untuk meraih kepentingan nasional (kepentingan keamanan bagi neorealis dan kepekaan ekonomi bagi neoliberal) di bawah kondisi sistemik yang anarkis. Dengan cara berpikir neo-neo hubungan antara negara berdaulat dengan aktor internasional lain – misalkan negara-negara tetangga di kawasan dikelola dengan logika strategis. Kerja sama dibuat berdasarkan atas identifikasi kesamaan kepentingan material. Kebijakan yang tidak segaris dengan haluan materialisme strategis dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan dapat merongrong kapabilitas nasional berupa infrastruktur keamanan dalam perspektif neorealis dan sumber daya ekonomi beserta kemampuan produksi dalam perspektif neoliberal. Sebagai konsekuensi penyimpangan orientasi kebijakan strategis, maka negara berdaulat bisa menjadi negara gagal (Crawford, 2000).

Respons neo-neo tidak akan cukup untuk menjangkau aspek-aspek interaksi internasional yang lebih luas dan kompleks. Ambil contoh dinamika yang berkenaan dengan posisi dan keterlibatan aktor nonnegara serta isu keamanan transnasional seperti terorisme; agenda komunitas global seperti perubahan iklim, migrasi, dan keberagaman hayati yang memiliki dimensi persoalan mengenai mekanisme koordinasi berbeda dengan imperatif anarki tentang keharusan untuk berkompetisi dengan dukungan kekuatan nasional. Di luar tema-tema empiris dan kasus unik tersebut, masih ada sederet pertanyaan problematis yang mengarah kepada kritik terhadap reliabilitas neo-neo sebagai penjelasan untuk fenomena politik global pasca Perang Dingin. Dua yang paling menarik adalah; bagaimana neo-neo bisa menjelaskan dengan cara apa sistem internasional mengondisikan perilaku negara-negara berdaulat sehingga mau menerima otoritas supranasional di atas kepentingan strategis mereka; sebagaimana didemonstrasikan dalam pergeseran kebijakan dari aliansi militer menuju masyarakat internasional seperti Uni Eropa dan ASEAN (Acharya, 2000). Selain itu ada pula fenomena yang mengindikasikan mengapa sistem internasional yang didukung oleh orde militer

dan ekonomi kekuatan adidaya seringkali gagal mencegah krisis di wilayah-wilayah subsistem. Arah pertanyaan ini adalah seberapa valid instrumen strategis kebijakan luar negeri bisa menjamin stabilitas di dalam masyarakat internasional yang plural (Weber, 2007:100–101).

Pertanyaan-pertanyaan di atas, dan masih banyak lagi, yang diajukan oleh para pengkritik neo-neo membuat status akademik perspektif alternatif menjadi kian meningkat. John Gerard Ruggie (1998) menantang neo-neo terutama argumentasi utilitarian yang mendasari materialisme strategis, kemudian menunjukkan bahwa banyak fenomena politik dan diplomasi internasional yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang oleh rasionalisme. Richard Ashley (1986) menguji asumsi teoritis neorealisme dan berhasil membuktikan bahwa perilaku kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari pemaknaan yang ditimbulkan terhadap agensi bersangkutan. Argumen Ashley menjadi salah satu ‘batu bata’ fondasi pembentukan kerangka berpikir konstruktivisme yang mengedepankan signifikansi identitas dan nilai serta norma dalam politik global. Kedua perangkat analisis yang bersifat ideasional diabaikan oleh teori HI rasionalis. Namun bagi konstruktivis mereka berpengaruh; siapa dan bagaimana negara berinteraksi di lingkungan eksternal menjadi sorotan utama konstruktivisme (Kowert, 2001). Konstruktivis memberikan perhatian besar terhadap cara negara mengonsepsikan atau mempersepsikan kepentingan keamanan dan ekonomi. Oleh sebab itu, mereka mendedikasikan sumber daya intelektual guna mengonfirmasi arti penting kesamaan kepercayaan dan nilai (*shared beliefs and values*) di antara aktor-aktor internasional, serta efektivitas institusi-institusi global dalam proses negosiasi dan pembuatan aturan bersama demi mengamankan proses interaksi internasional yang dinamis (Hobson, 2000). Sudah barang tentu konsentrasi konstruktivis berada di luar jalur logika kepentingan pribadi yang melandasi tindakan rasional menurut neo-neo.

Asumsi dan contoh yang ditampilkan di atas bisa menjadi pegangan bagi para pengkaji HI yang tertarik dengan konstruktivisme mengenai mengapa nilai, norma, ekspektasi, aturan main, dan pembelajaran atau sosialisasi senantiasa muncul sebagai konsep-konsep pokok dalam karya para konstruktivis. Konstruktivisme

lalu dapat dipahami sebagai perspektif HI yang mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis esensial di balik tindakan para aktor. Konstruktivis memosisikan peran gagasan lebih penting daripada teori HI konvensional yang berfokus pada kepentingan material (Katzenstein ed., 1996). Berbeda dengan neo-neo yang menganggap faktor di balik perilaku aktor—dalam hal ini materialisme strategis—bersifat relatif konstan, konstruktivis menganut pandangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus berlangsung (Klotz, 1995). Dengan demikian konstruktivis selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja di balik tatanan politik global (Wendt, 1999:3-4).

Perkembangan Konstruktivisme dan Teori Kritis

Setelah meninjau secara ringkas perbedaan asumsional yang menempatkan konstruktivisme dalam posisi kontradiktif terhadap rasionalisme, pada bagian ini dibahas mengenai perkembangan perspektif konstruktivisme yang mengindikasikan posisi terpisah dan mandiri dari teori kritis, walaupun konstruktivis berhutang intelektual kepada para teoritis kritis seperti Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme Perancis. Meskipun demikian perlu disampaikan bahwa teori kritis bukan satu-satunya sumber referensi bagi para perintis konstruktivisme dalam studi HI. Ruggie, Kratochwil, dan Onuf mempelajari tradisi keilmuan di luar teori kritis yang bahkan bernuansa positivisme, seperti Hukum Internasional, Sosiologi modern, dan Filsafat untuk meramu kritik mereka terhadap rasionalisme. Walhasil, konstruktivisme pun menjadi ajang uji coba transdisiplinaritas *versus* interdisiplinaritas² dalam studi HI. Bagi mereka yang jarang membaca koleksi literatur HI dengan pendekatan

² Pengertian transdisiplin dan interdisiplin dalam studi HI secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Transdisiplin berarti memanfaatkan perangkat ontologi, epistemologi, dan metodologi dari disiplin di luar HI demi kepentingan keilmuan HI. Sedangkan interdisiplin berarti menggabungkan antara unsur-unsur epistemologi dan metodologi disiplin HI dengan disiplin lain, namun tetap berpijak pada ontologi HI, demi kepentingan keilmuan HI. Sehingga kedua metode keilmuan hanya berbeda dalam hal proporsi adopsi, absorpsi, dan properti instrumen pengetahuan selain HI.

teoritis maupun metodologis transdisiplin, walaupun sudah terbiasa dengan kajian interdisiplin, akan berpendapat bahwa usaha akademik konstruktivis melanggar kaidah-kaidah paradigmatik sains normal (*normal science*) yang mengutamakan pencapaian kejegan teori dan metode sebagaimana ditandaskan oleh filosof Thomas Kuhn (1970). Karakter transdisiplin konstruktivisme semakin kental terutama setelah tragedi 11 September 2001 yang membuka lebar ruang diskusi mengenai faktor-faktor sosial khususnya identitas religio kultural sebagai representasi kekuatan nonnegara yang berpengaruh terhadap dinamika kepentingan dan perilaku aktor kebijakan luar negeri di arena politik global (lihat misalkan Shaffer ed., 2006).

Konsekuensi dari agenda transdisiplin ataukah interdisiplin dalam konstruktivisme adalah perbedaan cara pandang mengenai metodologi riset di antara para konstruktivis. Di satu sisi, para konstruktivis interdisiplin tidak mau sepenuhnya mengakui dan mengadopsi metodologi ala perspektif teori kritis, dan sebaliknya menyandingkan metodologi dan teori kritis dengan unsur-unsur positivisme. Mereka berpendirian konservatif khususnya menyoal keperluan menjadi peneliti yang objektif dan mendasari penilaian epistemologis menurut bukti empiris. Sementara itu, kalangan konstruktivis transdisiplin menolak positivisme dan mengambil haluan teoritis kritis yang percaya bahwa tidak ada peneliti maupun objek penelitian beserta relasi di antara mereka yang benar-benar linear —lepas dari intervensi subjektivitas (Klotz dan Lynch, 2014:16–20). Agar lebih jelas mengenai tren tema-tema transdisiplin yang saat ini menjadi warna konstruktivisme HI, maka perlu untuk meninjau terlebih dahulu aspek-aspek penting dari teori kritis yang menjadi landasan pemikiran para konstruktivis.

Teori kritis merupakan himpunan pengetahuan yang kompleks, dan bahkan sangat kompleks untuk diceritakan hanya dalam satu bab buku. Sintesis teori kritis mencakup bidang multidisiplin; mulai dari psikologi, filsafat, antropologi, hingga seni dan tata ruang. Oleh sebab itu hanya akan diperkenalkan beberapa bagian kecil, yang mendasar dan penting, dari teori kritis yang secara langsung berkontribusi untuk mentransformasi paradigma studi HI kontemporer. Ulasan dapat dimulai dari fondasi dasar ontologis ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh seorang sarjana terkemuka dari Mazhab Frankfurt Jurgen Habermas (dikutip dari Fultner, 2014) yang menulis buku *Knowledge and Human Interest*, yakni

sebagaimana telah disinggung di subbab mengenai asal usul konstruktivisme, fakta tidak berbicara secara langsung atau independen kepada para peneliti/pengkaji/pengamat. Mereka yang berkepentingan terhadap fakta yang kemudian memberikan pemaknaan atau definisi sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena itu, konstruksi fakta berimplikasi kepada relasi antara subjek dan objek penelitian yang tidak pernah netral atau objektif. Habermas mengemukakan sebuah konsep yang disebut *knowledge constitutive interests* untuk menggambarkan bahwa segala tindakan manusia untuk memproduksi pengetahuan—mulai dari rasa ingin tahu, membuat pertanyaan atas permasalahan yang dijumpai, sampai formulasi jawaban teka teki yang digeluti— merupakan refleksi dorongan kepentingan personal/individual. *Knowledge constitutive interests* dibedakan menjadi tiga jenis, yang secara mudah bisa dipahami sebagai; *instrumental* yang merujuk kepada pengetahuan tentang relasi antarmanusia; *strategic* yang merujuk kepada tujuan untuk mengoordinasikan tindakan manusia demi mencapai maksud sosial dan politis tertentu; dan *emancipatory* yang merujuk kepada tindakan untuk melawan relasi sosial dan politik yang menindas dan agresif. Konsep *emancipatory knowledge constitutive interest* sangat berpengaruh terhadap teori HI khususnya membidani kelahiran teori normatif kosmopolitanisme. Dua sarjana HI kontemporer yang mendasarkan pemikiran serta karya mereka pada konsep *emancipatory knowledge constitutive interest* adalah Andrew Linklater (2007) dan Richard Shapcott (2001) yang berupaya menteorikan perubahan global melalui etika dialog.

Baik Linklater maupun Shapcott menyarankan komunikasi sebagai kegiatan yang inheren—bermuatan moral—dalam setiap aspek kehidupan manusia, dan di level internasional, menjadi media perubahan yang konstruktif. Argumentasi mereka memang terdengar idealis, bahkan utopis, bagi para positivis dan rasionalis yang selalu meminta bukti serta metode pembuktian bahwa setiap orang pasti akan bertindak secara etis karena didorong oleh moralitas. Tetapi kritik rasionalis yang menyatakan bahwa di dunia nyata, realita sangat berbeda dengan imajinasi teori kritis terlalu menyepelkan kualitas argumentasi yang dibangun oleh para kosmopolitan teori kritis. Yang menjadi inti dari teori etika Linklater dan Shapcott sebenarnya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi normativitas; tindakan seseorang (pembuat kebijakan atau politisi) adalah etis,

atau sebaliknya tidak etis, tergantung kepada pemahaman mereka tentang etika, dan bukan karena tujuan emansipatori yang bersandar kepada etika.

Bjola dan Komprobst (2013) memberikan contoh sederhana mengenai praktek diplomasi untuk memahami cara berpikir Habermas, Linklater, dan Shapcott tentang kebenaran etika dan moralitas dalam tindakan manusia. Banyak orang mengatakan diplomasi adalah 'berbohong demi kepentingan negara'. Seorang diplomat tidak akan pernah menyampaikan kebenaran seperti apa adanya apabila hal dimaksud berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun, berbohong hanya akan menjadi strategi yang efektif manakala mereka yang dibohongi menganggap benar. Jika semua diplomat berbohong, maka kegiatan diplomasi akan terhenti seketika, sebab diplomasi membutuhkan paling tidak sekali waktu ada kebenaran yang diungkapkan. Ilustrasi diplomasi dan berbohong mengisyaratkan terdapat kesenjangan antara nilai moral dan nilai strategis. Berbohong sebagai sebuah respon strategis—memanipulasi lawan dengan cara memberi informasi yang bukan sebenarnya—ternyata merugikan bagi proses diplomasi. Terlebih lagi kebohongan hanya akan efektif ketika pihak lain menempatkan kebenaran sebagai yang terpenting dari berbagai hal lain.

Contoh mengenai kebohongan sebagai praktek diplomasi mengilustrasikan relasi antara individu dan bentuk-bentuk kolektivitas dalam kosa kata moralitas. Konstruksi relasi demikian memetakan ekspektasi yang terbentuk menuju proses bersifat mutualistik, sekaligus memberi indikasi praktis dan peristiwa saat mana ekspektasi tidak terpenuhi. Sebuah perumpamaan lain misalkan dalam sebuah kelas studi HI di universitas, mahasiswa mengharapkan agar pemikiran dan opini mereka mendapatkan apresiasi. Tetapi karena perilaku dan metode pengajaran dosen yang kurang tepat, harapan tersebut tidak tercapai. Sehingga, para peserta kelas mengeluh dan mengadu kepada otoritas institusi pendidikan bahwa pengajar tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Axel Honneth (1998) mengembangkan teori pengakuan (*recognition theory*) sebagai refleksi dimensi moral dalam relasi sosial. Gagasan Honneth diterima baik dalam disiplin Sosiologi, Ilmu Politik, dan Filsafat abad ke-21. Dalam konteks teorisasi HI, Haacke (2005) mengadopsi teori pengakuan Honneth ke dalam teori normatif. Dari perspektif teori normatif, prinsip komunikasi dan dialog sebagaimana dicetuskan oleh Teori Kritis merupakan faktor yang menentukan

sifat dan kualitas relasi sosial (implementasi strategis konsep komunikasi dan dialog dalam level hubungan antarbangsa terlihat dalam konsep *trust-building* pada proses diplomasi dan negosiasi). Teoritisi Kritis percaya bahwa relasi sosial yang dibangun atas dasar ketidakjujuran tidak akan bermanfaat bagi pihak mana pun, sebab di balik interaksi terdapat tujuan moral demi kebaikan bersama. Oleh sebab itulah, kebajikan (*goodwill*) memegang peranan penting dalam kerja sama antaraktor. Secara umum teori kritis menekankan kepada hakikat relasi kemanusiaan sebagai sarat konflik; dan melekat pada situasi konflik, serba hadir tindakan koersi dan dominasi sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tekanan terus menerus yang dialami oleh elemen-elemen sosial dalam interaksi asimetris mendorong upaya perlawanan atau resistensi yang bertujuan semata-mata demi memperoleh pengakuan; sifat pengakuan yang diperjuangkan adalah timbal balik. Dengan demikian, Teori Kritis yang bersumber dari dialektika Hegel dan Marx memandang aspek-aspek seperti moralitas, tujuan bersama, keadilan, dan pengakuan penting bagi keberlangsungan sistem secara normal (George, 1994).

Jadi bila dibuat sebuah perbedaan konseptual dasar mengenai status dan fungsi norma dalam interaksi sosial, teori kritis dan konstruktivisme berada di dua sisi yang saling berlawanan. Konstruktivis akan mengatakan sebuah norma internasional valid manakala telah ada kesepakatan umum mengenai signifikansi norma tersebut sebagai referensi tindakan kolektif. Sedangkan, teoritis kritis akan menginterogasi terlebih dahulu berbagai konteks wacana dan motivasi di balik konsensus tentang suatu norma internasional (Cochran, 2004). Meskipun demikian, perbedaan mengenai cara adopsi dan adaptasi perangkat normatif dalam sistem sosial dan relasi antarbangsa di antara konstruktivis dan teoritis kritis bukanlah satu-satunya poin 'pemisah' intelektualitas mereka. Karya-karya individual para konstruktivis maupun teoritis kritis mendemonstrasikan divergensi dalam lebih banyak area khusus; termasuk makna identitas, nilai kolektif, legitimasi politik dan atribut sosial kultural yang melekat pada aktor internasional kontemporer. Untuk keperluan pengenalan, cukup kiranya disampaikan konsepsi dasar normatif yang membedakan kedua perspektif teoritis HI yang sebenarnya mempunyai orientasi analisis sama, yakni ikhwal ketertindasan yang membutuhkan upaya transformasi sosial dan politik.

RELEVANSI KONSTRUKTIVISME UNTUK ANALISIS DAN RISET HI

Relevansi konstruktivisme sebagai penyedia kerangka analisis dan instrumen riset HI dapat dipetakan dalam dua area pokok dengan varian tematis masing-masing yang lebih spesifik.

Pertama adalah area studi dan riset tradisional, yang mencakup kebijakan luar negeri (*foreign policy*), diplomasi dan konflik internasional, serta organisasi dan hukum internasional. Disebut tradisional karena sejak HI menjadi disiplin mandiri (lepas dari bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan) pada awal 1920-an, tema-tema dimaksud telah menjadi pokok bahasan. Dalam perkembangan studi HI di Amerika Utara dan Eropa Barat, tema-tema tradisional didominasi oleh perspektif neo-neo yang memosisikan negara sebagai aktor utama yang berinteraksi dalam sistem internasional anarkis. Sedangkan kehadiran konstruktivisme sebagai paradigma alternatif memberi warna analisis berbeda, yaitu dengan mereformulasi asumsi dasar aktor utama dan anarki menjadi multiaktor dengan kondisi sistemik bersifat diskursif—tergantung pada bagaimana cara pandang setiap aktor internasional (Reus-Smit, 1995).

Intervensi konstruktivisme membuat pengetahuan dan penelitian HI yang menyoroti perilaku kebijakan luar negeri berbeda secara ontologis dan epistemologis. Dari aspek ontologi, konfigurasi aktor yang memengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri bersifat plural. Dalam perspektif neo-neo kebijakan luar negeri dirumuskan dan dijalankan oleh negara berdaulat diwakili elit pemerintahan—individu dan kelompok—beserta para diplomat. Sedangkan dari kacamata konstruktivis, proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan melibatkan relasi antara struktur negara dengan elemen kekuatan masyarakat. Karakteristik interaksi politik antaraktor tidak melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kompleks melibatkan ide, nilai, dan institusi (Hill, 2003).

Para konstruktivis menjelaskan bagaimana aspek nonmaterial memengaruhi kebijakan luar negeri, misalkan melalui dua konsep dasar, yakni identitas dan norma. Aktor-aktor internasional bertindak menurut identifikasi mereka terhadap eksistensi aktor lain dan respon mereka terhadap kaidah interaksi yang berlaku dalam lingkungan tertentu (Sato dan Hirata, 2008). Resultan dari kedua jenis

pengamatan baik terhadap identitas maupun norma adalah persepsi masing-masing aktor tentang situasi eksternal. Berdasarkan atas pemahaman situasional inilah kebijakan luar negeri didesain sebagai respon kognitif, psikologis, dan sosial (Beach, 2012). Pendekatan konstruktivis mengenai orientasi kebijakan luar negeri bersifat humanis (*human-centric approach*), yang berarti bahwa faktor intrinsik dalam diri individu yang ambil bagian dalam proses politik berperan penting untuk menentukan arah dan target tindakan (Almezaini, 2012). Jadi tidak seperti para neo-neo rasionalis yang kukuh dengan kalkulasi material strategis, yang mengandaikan individu dan kebijakan ataupun tindakan dilakukan senantiasa berdasarkan perhitungan untung rugi.

Gaya analisis konstruktivis kemudian memberikan nuansa epistemologi sosiokultural di dalam konseptualisasi dan teorisasi HI kontemporer. Misalkan penggunaan konsep persepsi sebagai unit deskripsi fundamental di balik perilaku aktor negara membuka wacana baru bagi tema-tema terkait. Diplomasi dan konflik internasional yang menurut neo-neo adalah media implementasi strategi kebijakan luar negeri dengan landasan pilihan-pilihan rasional semata, kini mempunyai pengertian yang beragam. Konstruktivis menambahkan pemahaman bahwa diplomasi dan konflik antarbangsa merupakan proses interaksi yang ditentukan oleh derajat kesenjangan ataupun keselarasan persepsi satu aktor dengan yang lain mengenai berbagai hal yang menyangkut hubungan mereka, terutama apakah hubungan dua arah di antara mereka mengindikasikan gejala penciptaan kebaikan bersama (*common good*) (Clunan, 2009); dalam hal ini tampak pengaruh Teori Kritis Habermas, Linklater, dan Shapcott dalam konsepsi dan metode berpikir konstruktivis. Lebih jauh lagi para konstruktivis mengeksplorasi komponen-komponen sosiokultural yang mendukung proses pembentukan persepsi individual, seperti ajaran agama dan etnisitas (Lapid dan Kratochwill, 1996). Hasilnya adalah percampuran yang tidak mudah dirumuskan secara matematika antara faktor material dan ideasional di balik hubungan antaraktor internasional (Burchill, 2005).

Modifikasi dan penataan ulang paradigma pemikiran juga terjadi dalam subjek positivis seperti organisasi dan hukum internasional. Di antara berbagai tema penting dalam HI tradisional, kajian organisasi dan hukum internasional termasuk yang paling akhir, namun tidak berarti kurang mengesankan, dalam

mengadopsi konstruktivisme. Secara substansi kajian mengenai organisasi dan hukum internasional di bingkai melalui kombinasi filsafat hukum modern, Sosiologi empiris klasik dan teori politik Weberian. Dimensi naturalistik sangat kuat dalam berbagai karya akademik HI yang membahas misalkan relevansi organisasi dan hukum internasional dalam menciptakan tatanan dunia yang harmonis (Dunoff, 2013). Pengaruh teori-teori liberal tentang perang dan damai, yang paling populer adalah perdamaian demokratis, terefleksi dalam argumentasi para pengkaji organisasi dan hukum internasional yang memprioritaskan sinergi antara demokrasi/demokratisasi dan perdamaian/upaya resolusi konflik melalui kehadiran pihak ketiga—dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga advokasi dan peradilan internasional (Armstrong, Farrell, dan Lambert; 2007). Landasan argumentasi liberal ialah penyelesaian konflik internasional melalui mekanisme institusi dan hukum internasional hanya akan efektif apabila ditunjang oleh kekuatan material (*material power*) yang memadai. Dengan kata lain, sumber tertib internasional tetap tergantung kepada bagaimana aktor-aktor dapat mengelola distribusi kekuatan, yang mana peran norma dan institusi hukum internasional bersifat komplementer.

Sementara itu, para konstruktivis memberikan penekanan yang berbeda dengan materialisme ataupun positivisme hukum internasional ala liberalisme. Faktor identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif lebih berpengaruh daripada observasi kondisi alamiah para aktor. Konstruktivis menggunakan persepsi sebagai alat analisis yang secara kritis memandang bahwa penerimaan maupun penolakan atas keberlakuan tradisi dan aturan main dalam interaksi antarbangsa dilatarbelakangi oleh faktor konsensus. Akibatnya, determinasi kekuatan fisik aktor tidak akan efektif membuat kepatuhan terhadap kaidah internasional yang diterapkan dalam sistem, melainkan seberapa besar kesepakatan bersama; dalam bentuk apa kesepakatan bersama; dan untuk berapa lama kesepakatan bersama bisa dipertahankan melalui komunikasi dan dialog antaraktor. Dalam proses penerimaan norma internasional, konstruktivis mengatakan model sosialisasi yang dipraktikkan di berbagai tempat dan isu berbeda menurut karakter relasi sosial dan budaya yang berlangsung antaraktor (Kratochwill, 2014).

Kedua adalah area riset nontradisional yang mencakup isu transnasionalisme dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Disebut nontradisional karena dua alasan. *Pertama* adalah alasan akademik terkait dengan perkembangan studi HI terutama pada dekade 1980-an yang mendemonstrasikan perdebatan teoritis dan metodis antara neo-neo rasionalis positivis dengan teori kritis; babak yang dikenal juga sebagai *Third Debate*. Diskursus *Third Debate* memproduksi beberapa sintesis teoritis HI dengan variasi yang rumit. Salah satu yang mudah untuk dibaca adalah tiga kategorisasi teori HI yang masih mencerminkan relevansi level analisis aktor dan faktor, yakni *statist theory*, *transnationalist theory*, dan *structuration theory*. Pokok bahasan di antara mereka adalah; manakah yang lebih kuat antara negara atau masyarakat dalam menentukan arah perkembangan politik domestik dan global. *Statist theory* menyatakan negara sebagai yang lebih kuat, sementara *transnationalist theory* menyebut kekuatan masyarakat lintas batas dapat melampaui kekuatan negara. *Structuration theory*, yang diinspirasi oleh teori strukturasi dari Anthony Giddens memberi jalan tengah, yaitu bukan persoalan mana yang lebih menentukan antara kekuatan negara atautkah masyarakat, melainkan bagaimana negara dan masyarakat bisa saling mengakomodasi diri untuk menciptakan mekanisme relasi yang progresif (Reus-Smit, 2008). Penulis seperti George Snedeker (2004) berargumen—dengan memakai teori strukturasi Giddens—bahwa negara dan masyarakat menghadapi dilema yang sama ketika berurusan dengan kekuatan ketiga, yakni pasar dan kapital di era globalisasi. Dalam konteks inilah teori kritis merespons dengan konsep dialog dan komunikasi ala Habermas (lihat misalkan karya Mackendrick, 2007).

Kedua, *Third Debate* memunculkan reaksi negatif namun produktif dari sekelompok sarjana HI yang mengkritik dan menolak perdebatan antarparadigma tanpa akhir. James D. Long *et al* (2012) menyebutkan bahwa HI sudah terlalu lama terjebak ke dalam pertentangan metateori yang abstrak, dan konsekuensinya adalah HI kehilangan signifikansi aksiologis atau praktis dari tujuan kegiatan intelektual, seperti aplikasi teori untuk memperbaiki kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan serta mendorong perubahan sosial dan politik yang bermanfaat. Intinya, Long dan rekan-rekannya mengeluhkan soal terlalu besar porsi abstraksi yang tidak aplikatif dibandingkan produk akademik yang langsung berguna bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, HI dan khususnya teori HI harus

memberikan perhatian lebih serius, proporsional dan profesional kepada usaha mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat internasional (*problem-solving oriented theories*). Gagasan Long *et al* (2012) disebut juga pragmatisme. Dalam Ilmu Sosial dan Filsafat Ilmu, pragmatisme sudah lama dikenal dan menjadi bagian epistemologi yang absah. John W. Burton (dikutip dalam Dunn, 2004) mengembangkan tradisi pragmatisme dalam HI melalui kajian teoritis dan praktis mengenai hakikat konflik dari sisi kebutuhan dasar manusia sebagai alternatif paradigma realisme dengan visi politik kekuatan (*power politics*), dan menyusun kerangka kerja resolusi konflik berdasarkan ukuran-ukuran praksis seperti akses terhadap bahan pangan dan sumber energi.

Pragmatisme dalam konteks teori dan metodologi HI dikembangkan menjadi prinsip-prinsip riset yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi kombinasi konseptual dan teoritis lintas paradigma (Wallace, 1996). Semboyan mereka adalah *eclecticism* atau eklektikisme. Terminologi eklektikisme diadopsi metode analisis Sastra dan Filsafat pos-strukturalis, yang dengan cara sederhana dapat dinyatakan sebagai; kombinasi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode apapun dari berbagai sumber tradisi keilmuan yang relevan untuk kepentingan memecahkan suatu permasalahan (Sil dan Katzenstein, 2010:1-2). Dengan demikian, bila kedua orientasi teori dan metodologi luaran *Third Debate* ini digabungkan maka menjadi eklektikisme pragmatisme/eklektik pragmatis (Franke dan Weber, 2012). Kata kuncinya adalah *problem solving with combinative approaches*.

Di tengah kedua perkembangan teoritis dan metodis inilah konstruktivisme memperoleh ruang gerak semakin luas untuk mengintervensi studi dan riset HI kontemporer. Salah satu terobosan agenda praktis sekaligus akademik yang dipromosikan para konstruktivis sejak awal 1990-an adalah transnasionalisme kosmopolitan (*cosmopolitan transnationalism*).

Fokus kajian transnasionalisme kosmopolitan adalah pada fenomena migrasi global. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan institusi sosial, perpindahan individu dan kelompok yang melewati batas negara secara global mengalami pergeseran tren bila dibandingkan dengan migrasi pada masa sebelum abad ke-19. Para konstruktivis memotret fenomena migrasi global sebagai

input, unit eksplanasi sekaligus subjek analisis dengan kerangka berpikir yang mengindikasikan sintesis pragmatisme dan eklektikisme. Apabila dibuat ringkasan kerangka analisis yang dihasilkan, maka diperoleh tiga kategori teori, yang terdiri atas realis konstruktivisme, liberal institusionalisme, dan konstruktivisme kultural (Gallarotti, 2010).

Ketiga teorisasi menawarkan penjelasan berbeda mengenai tren, implikasi, dan solusi permasalahan migrasi global. Realis konstruktivisme menjelaskan bahwa migrasi global merupakan efek langsung dari pelemahan kedaulatan negara yang diakibatkan oleh penguatan dimensi nonpolitik interaksi sosial di tingkat domestik maupun global. Migrasi global berpotensi menimbulkan aneka macam ancaman teritorial dan sosial dalam bentuk seperti degradasi semangat nasionalisme dan kebangkitan ideologi transnasional berbasis aspirasi etnisitas dan terorisme. Jalan keluarnya menurut realis konstruktivis adalah rekonsiliasi antara agensi dan motivasi elit serta masyarakat yang selama proses internasionalisasi peran aktor subnasional menjadi semakin terpisah jauh (Nassar, 2004).

Liberal institusionalisme berargumen bahwa fenomena migrasi global adalah konsekuensi historis dan empiris dari perkembangan interaksi sosial di berbagai sektor ekonomi dan budaya yang diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi serta keuangan. Tidak ada satu kekuatan politik maupun bersenjata yang akan mampu mencegah dan mengeliminasi pengaruh aktivitas migrasi global, terutama karena tidak mungkin untuk membendung arus pertukaran ide dan gaya hidup kosmopolitan yang terus berlangsung di mana-mana. Konsep kosmopolitan tumbuh menjadi retorika sekaligus tujuan objektif para migran yang menginginkan perubahan tatanan global menjadi '*...a borderless world for all humankind*s'. Untuk menangani eksese negatif migrasi global, seperti terorisme dan kriminalitas, maka yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat internasional adalah memperkuat institusi dan norma aplikatif yang mengatur persoalan terkait migrasi lintas batas (Tamas dan Palme, 2006).

Cara pandang yang ketiga, konstruktivisme kultural, menyoroti pada peran budaya populer sebagai *social template* yang mengalami proses reproduksi dan rekonstruksi secara massif dan terinternalisasi sampai ke level unit terkecil seperti komunitas dan keluarga. Melalui sintesis antara teori Sosiologi kritis, Antropologi dan Ekonomi, konstruktivisme kultural mewacanakan konsep '*cultural state and*

political society' untuk mendeskripsikan kecenderungan dan faktor pendukung keinginan seseorang dan kelompok untuk pindah dari suatu negara ke negara lain (Friedman dan Randeria, 2004). Identitas menjadi elemen paling menonjol dalam analisis konstruktivisme kultural, baik yang menyangkut respons negara, organisasi internasional maupun kelompok sosial terhadap muatan material maupun ideasional dari fenomena migrasi global.

Produk yang paling kontroversial dari konstruktivisme kultural adalah konsep *global commonwealth of citizens*. Dengan mengambil unsur-unsur konsep *international society* dari *The English School of International Relations*, konstruktivis kultural mencoba 'mengawinkan' konsep peradaban, lokalitas, dan orde internasional menjadi ramuan teoritis baru mengenai karakteristik sistem internasional yang didiami oleh aktor sosial tanpa batas teritorial nasional. Preskripsi mereka pun berdasarkan agenda seperti perlindungan identitas, anti-fundamentalisme, dan demokrasi kosmopolitan sebagai metode preventif dan kuratif implikasi negatif migrasi global (Archibugi, 2008).

PENUTUP

Pada bab ini sudah dilakukan survei yang menginformasikan secara ringkas mengenai pengertian dasar, asumsi pokok, perkembangan dan relevansi konstruktivisme sebagai pendekatan teori dan metodologi HI kontemporer. Perlu ditekankan kembali bahwa hakikat konstruktivisme bukanlah teori formal seperti teori-teori rasionalis mengenai kekuatan dan konflik, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, serta referensi teori HI skala menengah (*middle-range theory*) seperti integrasi regional dan komunitas keamanan. Konstruktivisme adalah seperangkat argumentasi tentang karakteristik sistem, perilaku aktor serta proses interaksi yang ditujukan mengatasi kesulitan dan/atau kelemahan yang ditemukan dalam neo-neo rasionalisme sebagai paradigma akademik HI. Oleh sebab itu, konstruktivisme memuat berbagai jenis gagasan yang tidak disampaikan maupun kritik terhadap neorealisme dan neoliberalisme.

Membaca konstruktivisme dan produk-produk HI konstruktivis memang acapkali lebih sulit bila dibandingkan dengan neo-neo. Hal ini tentu bisa dipahami sebab dalam perkembangan konstruktivisme menuju salah satu

perspektif HI, terjadi bermacam dialektika yang menghasilkan sintesis pemikiran bercorak interdisipliner dan transdisipliner. Walaupun demikian, konstruktivisme menampilkan suatu wawasan berpikir HI yang orisinal dan progresif. Untuk menyimpulkan secara sederhana, maka dikemukakan proposisi berikut; dalam konteks ontologi, subjek studi HI menjadi interaksi antarnegara bangsa plus aktor-aktor non-negara bangsa; dalam konteks epistemologi, teori HI menjelaskan hubungan kausal antara *power*, *wealth*, dan *identity*; dan dalam konteks metodologi, studi HI bersifat positivis, postpositivis, dan boleh menggabungkan aneka ragam pendekatan relevan dalam bentuk pragmatisme eklektis.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. 2000. *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia*. Oxford University Press.
- Adler, E. 2005. *Communitarian International Relations*. Routledge.
- Almezzaini, KS. 2012. *The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities and Interests*, Routledge.
- Archibugi, D. 2008. *The Global Commonwealth of Citizens: toward Cosmopolitan Democracy*. Princeton University Press.
- Armstrong, D., Farrell, T., and Lambert, H. 2007. *International Law and International Relations*. Cambridge University Press.
- Ashley, R. 1986. The Poverty of Neorealism. Dalam, Robert O. Keohane. *Neorealism and its Critics*, (ed.). Columbia University Press.
- Beach, D. 2012. *Analyzing Foreign Policy*. Palgrave MacMillan.
- Biola, C., and Komprobst, M. 2013. *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*. Taylor and Francis.
- Burchill, S. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave MacMillan.
- Clunan, AL. 2009. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity and Security Interests*. Johns Hopkins University Press.
- Cochran, M. 2004. *Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach*. Cambridge University Press.

- Crowford, RMA. 2000. *Idealism and Realism in International Relations*. Routledge.
- Dunn, DJ. 2004. *From Power Politics to Conflict Resolution: the Work of John W. Burton*. Palgrave Macmillan.
- 24
4 Dunoff, JL. 2013. *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: the State of the Art*. Cambridge University Press.
- Franke, U., and Weber, R. 2012. At the Papini Hotel: on Pragmatism in the Study of International Relations. *European Journal of International Relations*, 18(4), 669–691. 22
- Friedman, J., and Randeria, S. 2004. *Worlds on the Moves: Globalization, Migration and Cultural Security*. I. B. Tauris.
- Fultner, B. 2014. *Jurgen Habermas Key Concepts*. Taylor & Francis.
- 2 Gallarotti, G. 2010. *The Cosmopolitan Power: A Synthesis of Realism, Neoliberalism and Constructivism*. Palgrave Macmillan.
- George, J. 1994. *Discourses of Global Politics: A Critical (Re)introduction to International Relations*. Lynne Rienner Publishers.
- 25
20 Haacke, J. 2005. The Frankfurt School and International Relations; On the Centrality of Recognition. *Review of International Studies*, 31(1), 181–194.
- 9 Hill, C. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Palgrave Macmillan.
- Hobson, JM. 2000. *The State and International Relations*. Cambridge University Press.
- 21 Honneth, A. 1998. *The Struggle for Recognition; the Moral Grammar of Social Conflict*. Polity Press.
- Hopf, T. 1998. The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Affairs*, 23(1), 171–200.
- 2 Katzenstein, PJ. 1996. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Klotz, A. 1995. Norms Reconstituting Interests: Global Racial Equality and US Sanctions against South Africa. *International Organization*, 49(3), 451–478.
- Klotz, A., and Lynch, CM. 2014. *Strategies for Research in Constructivist International Relations*. Taylor and Francis.

- Klotz, A., and Prakash, D. 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. Palgrave Macmillan.
- Kratochwill, FV. 2014. *The Status of Law in World Society: Meditations on the Role and Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Kubalkova, V. 2001. *Foreign Policy in A Constructed World* (ed.). M.E. Sharpe.
- Kubalkova, V., Onuf, N., and Kowert, P. 1998. *International Relations in A Constructed World*, (eds.). M.E. Sharpe.
- Kuhn, TS. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd edition. Chicago University Press.
- Lapid, Y., and Kratochwill, FV. 1996. *The Return of Culture and Identity in International Relations Theory*. Lynne Rienner.
- Linklater, A. 2007. *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*. Taylor and Francis.
- Long, JD et al. 2012. *TRIP Around the World: Teaching, Research and Policy Views on International Relations in the 20th Country*. TRIP Project.
- MacKendrick, K. 2007. *Discourse, Desire and Fantasy in Jurgen Habermas' Critical Theory*. Taylor & Francis.
- Nassar, JR. 2004. *Globalization and Terrorism: the Migration of Dreams and Nightmares*. Rowman & Littlefield.
- Phillips, AB. 2007. Constructivism. Dalam, Marin Griffiths. *International Relations Theory for the Twenty-first Century. An Introduction*, (ed.). Routledge.
- Price, R., and Reus-Smit, C. 1998. Dangerous Liaisons: Critical International Theory and Constructivism. *European Journal of International Relations* 4(3), 259–294.
- Reus-Smit, C. 1995. *Beyond Foreign Policy: Constructivism, the State, and the Changing Global Order*. Centre for International Relations, Monash University.
- _____. 2005. Constructivism. Dalam, Scott Burchill et al. *Theories of International Relations*. 3rd edition. Cambridge University Press.
- _____. 2008. Constructivism and the Structure of Reasoning. Dalam, Richard Price. *The Limit of Moral and Possibility in World Politics*, (ed.). Cambridge University Press.

- 6 Ruggie, JG. 1998. *Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization*. Routledge.
- 10 Sato, Y., and Hirata, K. 2008. *Norms, Interests and Power in Japanese Foreign Policy* (eds.). Palgrave Macmillan.
- 18 Shaffer, B. 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*. MIT Press.
- 7 Shapcott, R. 2001. *Justice, Community and Dialogue in International Relations*. Cambridge University Press.
- 14 Sil, R., and Katzenstein, PJ. 2010. *Beyond Paradigm: Analytical Eclecticism in the Study of World Politics*. Palgrave Macmillan.
- 13 Snedeker, G. 2004. *The Politics of Critical Theory: Language, Discourse/Society*. University Press of America.
- 5 Tamas, K., and Palme, J. 2006. *Globalizing Migration Regimes: New Challenges to International Security*. Ashgate.
- Wallace, W. 1996. Truth and Power, Monks and Technocrats: Theory and Practice in International Relations. *Review of International Studies*, 22(3), 301–321.
- Weber, C. 2005. *International Relations Theory: A Critical Introduction*. Routledge.
- 12 Weber, M. 2007. *Constructivism and Critical Theory*. Dalam, Richard Devetak, Anthony Burke dan Jim George. *An Introduction to International Relations: Australian Perspectives*, (eds.). Cambridge University Press.
- 3 Wendt, A. 1992. Anarchy Is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
2	www.politicaltheory.dk Internet Source	1%
3	etheses.lse.ac.uk Internet Source	1%
4	Ulrich Roos. "Chapter 9 Beliefs and Loyalties in World Politics: A Pragmatist Framework for Analysis", Springer Science and Business Media LLC, 2015 Publication	<1%
5	www.eui.eu Internet Source	<1%
6	r-cube.ritsumeai.ac.jp Internet Source	<1%
7	Eccleston, Richard, Aynsley Kellow, and Peter Carroll. "G20 Endorsement in Post Crisis Global Governance: More than a Toothless Talking Shop? : Post Crisis Global Governance", British Journal of Politics & International Relations, 2014. Publication	<1%
8	Olivier Schmitt. "How to challenge an international order: Russian diplomatic practices in multilateral security organisations", European Journal of International Relations, 2019 Publication	<1%

9	docslide.fr Internet Source	<1%
10	www.diva-portal.org Internet Source	<1%
11	academic.oup.com Internet Source	<1%
12	www.iasj.net Internet Source	<1%
13	dokodoc.com Internet Source	<1%
14	www.colorado.edu Internet Source	<1%
15	eprints.ucm.es Internet Source	<1%
16	estudogeral.sib.uc.pt Internet Source	<1%
17	static.moadoph.gov.au Internet Source	<1%
18	library.soas.ac.uk Internet Source	<1%
19	www.tdx.cat Internet Source	<1%
20	etd.lib.nsysu.edu.tw Internet Source	<1%
21	oxfordre.com Internet Source	<1%
22	David Johannes Berchem. "8. Quellenverzeichnis: Bibliografie", Transcript Verlag, 2011 Publication	<1%

23

nonijunianti.blogspot.com

Internet Source

<1%

24

Neorealismus Neoliberalismus und
postinternationale Politik, 1997.

Publication

<1%

25

Juliet Kaarbo. "A Foreign Policy Analysis
Perspective on the Domestic Politics Turn in IR
Theory", International Studies Review, 2015

Publication

<1%

26

BRENT J. STEELE. "Liberal-Idealism: A
Constructivist Critique", International Studies
Review, 2007

Publication

<1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 5 words

Exclude bibliography

On